



Kegagalan *Felicity Conditions* dan Pelanggaran *Maksim Grice* dalam Tuturan Fitnah Aparat: Studi Kasus Sudrajat Es Gabus

**Fadhilah Sabrina¹, Zai Alpris², Saibil Aprilia³, Yusnika Sihite⁴, Rini Syarifah⁵,
Herning Puspitarini⁶, M. Oky Fardian Gafari⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Correspondence Email: fadhilahsabrina.akamsi@gmail.com.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, kondisi *felicity* teori *speech acts* (Austin & Searle) dan maksim Grice digunakan untuk menganalisis kegagalan komunikatif yang melanggar prinsip pragmatik ketika aparat negara menuduh Sudrajat Es Gabus. Dengan menggunakan pendekatan pragmatik kualitatif, data primer dari transkrip tuturan fitnah aparat di media sosial dan konferensi pers diuji menggunakan checklist *felicity conditions* (*sincerity, preparatory, propositional, essential*) dan klasifikasi pelanggaran maksim (*Quantity, Quality, Relation, Manner*). Mengungkapkan kegagalan *sincerity condition* karena niat manipulatif dan pelanggaran kualitas karena informasi palsu dan pelanggaran hubungan yang menimbulkan implikasi fitnah.

Kata Kunci: *Felicity Conditions, Maksim Grice, Pragmatic, Speech Acts, Tuturan Fitnah.*

ABSTRACT

In this study, the felicity conditions of speech act theory (Austin & Searle) and Grice's maxims are used to analyze communicative failures that violate pragmatic principles when state officials accused Sudrajat Es Gabus. Using a qualitative pragmatic approach, primary data from transcripts of defamatory statements by officials on social media and press conferences were tested using a checklist of felicity conditions (sincerity, preparatory, propositional, essential) and classification of maxim violations (Quantity, Quality, Relation, Manner). Revealing the failure of the sincerity condition due to manipulative intent and the violation of quality due to false information and the violation of relation that leads to defamatory implications.

Keywords: Felicity Conditions, Grice's Maxims, Pragmatics, Speech Acts, Slander Speech.

PENDAHULUAN

Di era digital, ruang publik menjadi lebih luas, sehingga berita tentang pemerintah mudah tersebar luas dan memengaruhi banyak orang di lapisan bawah masyarakat. Kasus Sudrajat, seorang penjual es gabus keliling yang telah berjualan selama puluhan tahun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan bagaimana tuturan aparat dapat berubah menjadi fitnah yang merusak reputasi ekonomi dan sosial. Dalam video yang tersebar di media sosial pada awal tahun 2026, terlihat sejumlah anggota TNI dan Polri mendatangi Sudrajat, meremas es gabusnya, dan menyatakan bahwa makanan itu terbuat dari spons dan berbahaya bagi anak-anak. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Stigma berkembang dari tuduhan bahwa Sudrajat menjual "es palsu" yang terbuat dari spons,

yang menyebabkan trauma baginya, trauma bagi anak-anaknya, dan kerugian finansial karena kehilangan pelanggan.

Dari sudut pandang pragmatik, tuturan aparat dalam situasi ini harus diteliti sebagai bentuk tuturan yang berpotensi fitnah, yang dapat melanggar persyaratan *felicity conditions* dalam teori *speech acts* (Austin & Searle) dan juga melanggar maksim kooperatif Grice. Dalam *felicity conditions*, komitmen penutur terhadap kebenaran, kejujuran, dan relevansi proposisi diperlukan. Di sisi lain, maksim *Quantity*, *Quality*, *Relation*, dan *Manner* menuntut bahwa penutur memberikan informasi yang cukup, benar, relevan, dan jelas (Austin, 1962; Searle, 1969; Grice, 1975). Ketika aparat menyatakan bahwa es gabus Sudrajat terbuat dari spons tanpa bukti ilmiah, tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran maksim *Quality* (berbohong atau tidak jujur) dan *Relation* (menghubungkan bahan es gabus dengan bahaya yang tidak proporsional). Selain itu, kondisi kebenaran tidak dipenuhi karena niat penutur lebih mengarah pada intimidasi daripada memberikan klarifikasi publik (Levinson, 1983; Grice, 1975).

Berdasarkan fenomena tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Dari sudut pandang teori *speech acts*, bagaimana tuturan aparat terhadap Sudrajat penjual es gabus mengalami kegagalan *felicity conditions*? (2) Jenis pelanggaran maksim Grice (*Quantity*, *Quality*, *Relation*, *Manner*) apa yang terjadi dalam pernyataan tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap wacana publik dan posisi sosial-ekonomi Sudrajat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana tuturan aparat yang berkuasa dapat berdampak negatif pada penutur rentan di ruang publik digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menemukan dan menganalisis *felicity conditions* dalam tuturan aparat terhadap Sudrajat penjual es gabus (Austin, 1962; Searle, 1969); (2) mengklasifikasikan pelanggaran maksim Grice, serta mekanisme *flouting* atau *violation*-nya (Grice, 1975; Levinson, 1983); dan (3) mengungkap dampak sosiopragmatik dari tuturan tersebut terhadap diskusi penegakan hukum dan persepsi masyarakat kecil di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian tentang pragmatik sociolinguistik dan studi wacana di Indonesia. Khususnya, penelitian ini akan berfokus pada penggunaan tuturan aparat dalam ruang publik digital yang melibatkan orang-orang kelas bawah di Indonesia (Wodak, 2009; Gee, 2011). Secara praktis, temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk pembentukan standar etika berbahasa bagi aparat, terutama dalam bidang penegakan hukum, di mana kekuasaan simbolik diperhatikan dan hak ekonomi dan reputasi masyarakat kecil dihormati.

Data tuturan dari video viral dan laporan media tentang kasus Sudrajat penjual es gabus membatasi ruang lingkup penelitian ini (CNN Indonesia, 2026; Kompas, 2026). Tidak ada aspek hukum pidana yang dibahas secara menyeluruh dalam analisis ini karena fokusnya terletak pada tuturan verbal yang diucapkan aparat selama penegakan hukum dan pengecekan komoditas. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan analisis forensik bahan baku es gabus; sebaliknya, itu merujuk pada informasi yang sudah tersedia dari produsen dan media terkait bahwa bahan es tradisional seperti sagu, gula, dan pewarna makanan adalah sumber es gabus (iNews Jabar, 2026; Kumparan, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud untuk menggantikan penjelasan ilmiah atau hukum yang lebih teknis; itu tetap berada dalam domain analisis pragmatik-sociolinguistik.

TINJAU PUSTAKA & KERANGKA TEORI

Menurut pragmatik, bahasa tidak hanya dianggap sebagai struktur tata bahasa tetapi sebagai tindakan yang terjadi di lingkungan sosial. Konteks situasi, identitas penutur, dan niat komunikatif memainkan peran penting (Levinson, 1983). Menurut perspektif ini, tidak hanya kosa kata dan kalimat yang menentukan makna, tetapi juga cara tuturan digunakan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pernyataan aparat yang bersifat publik, seperti pernyataan yang ditujukan kepada Sudrajat penjual es gabus, harus dianalisis bukan hanya dari bentuk kalimatnya, tetapi juga dari fungsi tindakannya (*speech act*) dan bagaimana hal itu berdampak pada persepsi publik (Yule, 2010).

Teori tindakan percakapan, yang diusulkan oleh Austin (1962) dan disusun lebih lanjut oleh Searle (1969) berfungsi sebagai dasar teoritis utama penelitian ini. Austin membedakan tuturan menjadi tiga kategori: *locution* (ucapan secara verbal), *illocution* (tindakan yang dilakukan dengan mengucapkan sesuatu, seperti menuduh, memerintah, atau menegaskan), dan *perlocution* (pengaruh yang ditimbulkan oleh tuturan pada pendengar, seperti ketakutan, keyakinan, atau stigmatisasi). Dalam kasus Sudrajat, tuduhan aparat bahwa es gabus yang dijualnya terbuat dari spons dan berbahaya dapat dianggap sebagai tindakan ilokusioner deklaratif yang mengklaim status negatif terhadap barang dan penjualnya.

Searle (1969) membagi tindakan ilokusioner ke dalam beberapa jenis. Ini termasuk *representative* (melaporkan atau menyatakan fakta), *directive* (memerintah atau menasihati), *commissive* (berjanji atau menjanjikan), *expressive* (mengungkapkan perasaan), dan *declarative* (menetapkan atau menonjokkan status sosial melalui pengucapan). Banyak pernyataan aparat yang secara formal memiliki kekuatan ilokusioner dalam penegakan hukum, tetapi maknanya menjadi sulit jika tidak didukung oleh prosedur dan bukti yang sah. Dalam kasus penjual es gabus Sudrajat, penelitian ini menggunakan kategori tindakan bicara Searle untuk mengkategorikan jenis tindakan ilokusi aparat dalam tuturan.

Konsep *felicity conditions* sangat penting untuk memahami kapan suatu ilokusioner dapat dianggap “berhasil” atau sah secara sosial. Konsep ini merupakan kelanjutan dari teori *speech acts*. Menurut Austin (1962), beberapa kondisi harus terpenuhi sebelum sebuah tuturan dapat dianggap ilokusioner. Kondisi-kondisi ini termasuk kejujuran (penutur harus jujur dan tulus dalam niatnya), kondisi persiapan (situasi, status, dan konvensi yang mengizinkan tindakan), kondisi proposisi (proposisi yang relevan dan dapat dinilai benar atau salah), dan kondisi penting (penutur harus serius ketika mengucapkan tindakan). *Felicity conditions* ini diciptakan oleh Searle (1969) untuk setiap jenis tindakan ilokusioner. Ini memungkinkan analisis lebih sistematis tentang apakah suatu tuturan memenuhi syarat pragmatismenya.

Dalam kasus Sudrajat, aparat menyatakan bahwa es gabusnya terbuat dari spons dan berbahaya, tetapi pernyataan itu tidak disertai dengan hasil uji laboratorium atau bukti ilmiah yang diungkapkan secara jelas, sehingga *sincerity condition* dan *preparatory condition* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ucapan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan *felicity conditions*, sehingga meskipun secara formal tampak sebagai tindakan deklaratif, secara pragmatik ia dapat kehilangan legitimasi sosial. Menurut studi pragmatik modern, pelanggaran *felicity conditions* sering muncul dalam diskusi otoritas. Ini terutama berlaku ketika lembaga atau pejabat publik membuat pernyataan yang bertentangan dengan data empiris atau

prosedur resmi (Wodak, 2009; Tannen, 2007). Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa, jika tuturan aparaturnya tidak memenuhi syarat untuk *felicity*, dapat menyebabkan ketidakadilan wacana.

Konsep kooperatif dan maksim-maksim yang diusulkan oleh Grice (1975), selain teori *speech acts*, mendukung analisis pragmatik penelitian ini. Dalam percakapan yang berjalan lancar, penutur dan pendengar dianggap bekerja sama untuk mencapai tujuan komunikatif. Dari asumsi kerja sama tersebut, Grice membuat empat maksim berdasarkan asumsi kerja sama: maksim *Quantity* (berikan informasi yang cukup, jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak), maksim *Quality* (berikan informasi yang benar, jangan ucapkan sesuatu yang tidak Anda yakini benar), maksim *Relation* (hendaklah tuturan Anda relevan dengan topik), dan maksim *manner* (buat ucapan Anda jelas, tidak ambigu, dan terstruktur).

Jika salah satu maksim dilanggar, komunikasi dapat terganggu; namun, jika pelanggaran itu dilakukan secara sengaja, penutur dapat menghasilkan *implicature* yaitu makna tersirat yang tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dipahami pendengar dari konteks (Grice, 1975; Levinson, 1983). Pelanggaran maksim *Quality* dan *Relation* sangat sering terjadi dalam konteks fitnah, terutama ketika orang yang menuduh pihak lain tanpa bukti yang memadai atau mengarahkan informasi ke arah yang tidak relevan. Menurut Yule (2010), pelanggaran kualitas maksim terjadi ketika orang menyampaikan informasi yang dianggap tidak benar. Sebaliknya, pelanggaran hubungan maksim terjadi ketika orang menghubungkan dua hal yang tidak sebanding untuk menghasilkan dampak yang signifikan atau menegaskan stigma.

Dalam kasus Sudrajat, penjual es gabus, ketika aparat menyatakan bahwa es gabusnya terbuat dari spons tanpa menunjukkan bukti resmi atau uji laboratorium, tuturan tersebut dapat melanggar maksim *Quality*. Sebaliknya, ketika pernyataan itu dikaitkan dengan ancaman terhadap anak-anak tanpa proporsi yang layak, tampak bahwa prinsip maksim *relation* juga dilanggar. Kerangka Grice telah digunakan oleh beberapa kajian pragmatik di Indonesia untuk menganalisis tuturan politik, wacana penegakan hukum, dan *hate speech* (Suryanto, 2019; Sari, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran maksim, khususnya *Quality* dan *Relation*, sering digunakan sebagai alat retorik untuk menstigmatisasi kelompok tertentu, terutama mereka yang berada dalam kelas sosial ekonomi rendah (Wodak, 2009).

Kerangka teori integratif dibangun oleh penelitian ini dengan mengacu pada teori *speech acts* (Austin, 1962; Searle, 1969), Cooperative Principle dan maksim Grice (Grice, 1975; Levinson, 1983), serta pandangan kritik wacana dan perspektif sociolinguistik (Wodak, 2009; Gee, 2011). Dalam struktur ini, analisis *felicity conditions* dikombinasikan dengan pengenalan jenis tindakan ilokusioner (Searle, 1969) dan klasifikasi pelanggaran maksim Grice digunakan. Oleh karena itu, tuduhan aparat terhadap Sudrajat dianggap tidak hanya sebagai tindakan lisan formal, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan kekuasaan yang menyebabkan stigma dan ketidaksetaraan komunikatif. Untuk menyelesaikan analisis, prosedur operasional yang digunakan termasuk menentukan ilokusi berdasarkan ujaran, memeriksa *felicity conditions* berdasarkan tuturan, mengklasifikasikan jenis pelanggaran maksim Grice, dan menginterpretasikan dampak sosial-retoris terhadap reputasi dan keadaan ekonomi Sudrajat sebagai penjual es gabus. Kemudian, struktur ini diterapkan pada laporan media tentang kasus Sudrajat penjual es gabus (CNN Indonesia, 2026; iNews

Jabar, 2026), memastikan bahwa analisis tetap berbasis teori yang valid dan data empiris.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, di mana fokus penelitian adalah analisis pragmatik tuturan aparat dalam kasus Sudrajat, penjual es gabus. Tuturan verbal anggota TNI-Polri yang terungkap dalam video yang tersebar luas di media sosial dan laporan berita media massa adalah subjek penelitian (CNN Indonesia, 2026; iNews Jabar, 2026). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kondisi kebahagiaan yang gagal dan pelanggaran maksim Grice dalam tuturan aparat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memahami dampak sociopragmatiknya terhadap posisi sosial-ekonomi Sudrajat sebagai penjual es gabus.

Data primer dan *sekunder* adalah jenis data yang digunakan. *Data sekunder* terdiri dari laporan berita, keterangan dari produsen es gabus tentang bahan baku yang digunakan, dan dokumen publik tentang penanganan kasus (CNN Indonesia, 2026; Kompas, 2026; iNews Jabar, 2026). *Data primer* terdiri dari tuturan verbal aparat yang diambil dari transkrip video yang disebarluaskan di platform media sosial (seperti YouTube, X/Twitter, dan Instagram) pada awal tahun 2026. Setelah data dikumpulkan melalui teknik analisis konten dan observasi langsung video yang tersedia, setiap elemen tuturan, intonasi, pengulangan, dan deiksis disimpan untuk analisis.

Berdasarkan teori *speech acts* (Austin, 1962; Searle, 1969) dan *Cooperative Principle* (Grice, 1975; Levinson, 1983), teknik analisis data mengikuti prosedur analisis kualitatif pragmatis yang dimodifikasi. Pada langkah pertama, setiap ujaran diidentifikasi sebagai *ilokusi*. Ini berarti mengkategorikan jenis tindakan ilokusioner, seperti representasi, perintah, komando, ekspresi, atau deklarasi, dan menentukan fungsi komunikatif utama tuturan aparat. Pada tahap kedua, *felicity conditions* dievaluasi. Ini berarti tuturan dievaluasi untuk memenuhi syarat *preparatory*, *sincerity*, *propositional*, dan *essential*. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, tuturan dianggap mengalami kegagalan *felicity conditions*.

Pada tahap ketiga, analisis pelanggaran maksim Grice dilakukan. Ini bertujuan untuk membedakan jenis pelanggaran maksim dari segi *Quantity*, *Quality*, *Relation*, dan *Manner*, dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan *flouting* atau *violation*, dengan dampak negatif. Pada titik ini, konteks sosial dan identitas penutur (aparat versus penjual es gabus) dibaca secara kritis untuk mengungkap bagaimana ucapan berfungsi sebagai wacana kekuasaan dan potensi fitnah. Tahap terakhir adalah memahami konsekuensi *sociopragmatik*. Ini berarti menghubungkan hasil analisis dengan pengaruh mereka terhadap psikologi, reputasi, dan ekonomi Sudrajat sebagai penjual es gabus serta posisi masyarakat kecil dalam diskusi penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan prinsip triangulasi untuk menjaga *kredibilitas* dan *reliabilitas* analisis. Ini berarti membandingkan interpretasi tuturan dengan konteks laporan media, informasi resmi tentang bahan baku es gabus, dan interpretasi makna publik dari komentar dan tanggapan online. Selain itu, deskripsi data disajikan secara jelas dengan contoh transkrip tuturan lengkap atau kutipan singkat yang tetap melindungi hak privasi, sehingga pembaca dapat memahami proses penafsiran. Oleh karena itu, analisis *micropragmatik* (tataran tuturan dan maksim) dikombinasikan

dengan analisis *sociopragmatik* dan kritik wacana. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam ranah kajian ilmiah yang berbasis teori dan data empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tuturan aparat terhadap Sudrajat penjual es gabus mengandung banyak kegagalan *felicity conditions* dan pelanggaran maksim Grice, yang berkontribusi pada stigmatisasi dan persepsi fitnah yang lebih kuat terhadap penjual es gabus. Beberapa pola utama dapat diidentifikasi berdasarkan transkrip tuturan yang diambil dari video viral dan laporan media. Pola pertama adalah kegagalan *sincerity conditions*, pola kedua yaitu pelanggaran maksim *Quality* dan *Relation*, dan yang ketiga adalah pembentukan *implicature* negatif yang berdampak psikologis dan ekonomi pada Sudrajat dan keluarganya (CNN Indonesia, 2026; iNews Jabar, 2026).

“Es gabusnya ternyata berbahan spons, ini berbahaya untuk anak-anak!” adalah salah satu komentar aparat yang muncul dalam video penertiban. Dari perspektif *speech acts* Searle (1969), tuturan ini termasuk *speech acts* jenis *representative*, atau pernyataan faktual, yang dimaksudkan untuk mengubah status sosial Sudrajat sebagai penjual es gabus yang “berbahaya” dan diarahkan sebagai deklaratif. Namun, tuturan ini mengalami kegagalan pada *sincerity condition* dan *preparatory condition* ketika dianalisis berdasarkan *felicity conditions*.

Karena penutur (aparat) tidak menunjukkan bukti ilmiah, hasil uji laboratorium, atau prosedur resmi yang disampaikan kepada publik pada saat yang sama dengan pernyataan tersebut, persyaratan *sincerity condition* tidak terpenuhi. Penutur dalam situasi ini tampaknya lebih mengandalkan pernyataan otoritatif (“ternyata berbahan spons”) tanpa menunjukkan proses verifikasi. Akibatnya, niat komunikatif mereka dapat dianggap sebagai intimidasi daripada klarifikasi ilmiah (Austin, 1962; Levinson, 1983). Selain itu, kondisi persiapan tidak sepenuhnya terpenuhi karena konteks sosial tidak menunjukkan bahwa pengujian bahan makanan telah dilakukan secara terbuka dan transparan, yang seharusnya menjadi syarat sebelum menyampaikan pernyataan yang memiliki dampak yang signifikan. Akibatnya, tuturan tersebut dapat mengalami *felicity failure*, yaitu tuturan yang secara formal tampak sah tetapi pada kenyataannya tidak memiliki legitimasi sosial-komunikatif.

Contoh tambahan terlihat ketika aparat menyatakan, “Ini tidak boleh dijual lagi, sudah meresahkan masyarakat!” Karena bermaksud untuk menghentikan penjualan es gabus, pernyataan ini termasuk deklaratif. Namun, sekali lagi, *preparatory condition* menjadi masalah karena penutur tidak mengungkapkan dasar resmi, seperti hasil pengujian, rekomendasi dinas, atau keputusan resmi, yang mendukung deklarasi tersebut. Dalam situasi sosial seperti ini, masyarakat kecil seperti Sudrajat tidak memiliki kemampuan yang sebanding untuk mengoreksi pernyataan tersebut secara langsung. Akibatnya, *felicity conditions* berdampak pada ketimpangan wacana antara orang yang berkuasa (aparat) dan orang yang rentan (penjual es gabus).

Dari sisi *Cooperative Principle* (Grice, 1975), tuturan aparat dalam kasus Sudrajat menunjukkan kecenderungan pelanggaran maksim *Quality* dan *Relation*. Maksim *Quality* menuntut bahwa pembicara tidak boleh mengatakan sesuatu yang dianggap tidak benar atau tidak memiliki bukti. Dalam contoh berikut, kalimat, “Es gabusnya ternyata berbahan spons”, penutur menyampaikan informasi penting tetapi

tidak memberikan bukti ilmiah yang memadai. Kondisi ini masuk dalam kategori pelanggaran maksim *Quality* menurut *Grice* (1975) dan *Levinson* (1983), karena pembicara membuat pernyataan yang mungkin menyesatkan tanpa mengungkapkan dasar kebenarannya.

Selain itu, terjadi pelanggaran maksim *Relation*, di mana penutur mengaitkan es gabus dengan “bahaya bagi anak-anak” tanpa proporsi informasi yang jelas. Pernyataan tersebut diucapkan dengan nada dramatis dan emosional dalam video, sehingga konteks hubungan terkesan digunakan untuk menimbulkan stigma dan kekhawatiran berlebihan daripada membangun argumen yang logis. Menurut *Yule* (2010), ketika seseorang mengaitkan dua hal yang tidak sebanding secara rasional (seperti bahan es dengan “spons berbahaya”), mereka dapat memberi kesan buruk pada penjual daripada produknya saja. “Sudrajat adalah penjual es “palsu” yang tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen, terutama anak-anak,” adalah konsekuensi yang muncul dalam konteks ini.

Sebaliknya, karena disampaikan secara tidak jelas, tanpa spesifikasi jenis uji, kriteria risiko, atau acuan ilmiah yang jelas, beberapa pernyataan aparat juga menunjukkan pelanggaran substansi *Manner*. Menurut logika *Grice* (1975), pelanggaran *Manner* seperti ini, meskipun tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran yang menghasilkan implikasi, tetap mengurangi kualitas kerja sama komunikatif karena pendengar sulit mengontrol dan memverifikasi apa yang disampaikan.

Sebagai hasil dari analisis, ditemukan bahwa penjual es gabus Sudrajat mengalami *felicity failure* pada *sincerity* dan *preparatory conditions* serta melanggar maksim *Quality* dan *Relation* *Grice*. Akibatnya, penjual es gabus distigmatisasi dan difitnah. Fenomena ini dalam bidang *sociolinguistik* menggambarkan bagaimana orang yang berkuasa, atau aparat negara, dapat menggunakan ucapan otoritatif untuk menggambarkan realitas sosial, meskipun substansi proposionalnya tidak sepenuhnya didukung oleh bukti publik yang jelas (*Wodak, 2009; Gee, 2011*).

Implikasi sociopragmatiknya memiliki tiga tingkat dampak. Pertama, Sudrajat kehilangan reputasi dan uang secara pribadi karena stigma “es berbahan spons”. Pelanggan dan pemasok lain cenderung menjauhi lapaknya, menurunkan penjualan. Kedua, pada tingkat sosial ekonomi, kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan penguasa dapat meningkatkan diskriminasi terhadap masyarakat kecil karena penjual kaki lima tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menentang pernyataan tersebut di tingkat publik yang sama. Ketiga, dari perspektif ideologis, tuduhan aparat terdiri dari pernyataan negatif yang tidak menunjukkan transparansi proses. Tuturan ini menguatkan gagasan bahwa masyarakat lebih mudah mempercayai kekuasaan institusi daripada penjelasan orang awam. Ini terlepas dari kenyataan bahwa kekurangan bukti ilmiah terbuka sebenarnya mengurangi kredibilitas komunikatif dari tuduhan ini.

Dari sudut pandang pragmatik-kritik, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan *felicity conditions* dan pelanggaran maksim *Grice* dalam tuturan aparat berfungsi sebagai mekanisme retorik yang menyebabkan stigma dan ketidakadilan wacana selain sebagai kesalahan linguistik. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menguatkan bahwa pedoman etika berbahasa harus diterapkan oleh aparat, terutama dalam hal penegakan hukum yang melibatkan masyarakat kecil, agar tuntutan ilokusioner dapat diterima dengan baik dan tidak melanggar prinsip kerja sama komunikatif.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa tuturan aparat terhadap Sudrajat penjual es gabus mengalami kegagalan *felicity conditions* dan pelanggaran maksim Grice, yang keduanya berkontribusi pada pembentukan stigma dan citra fitnah terhadap penjual es gabus. Dari perspektif *Cooperative Principle* dan maksim Grice (Grice, 1975; Levinson, 1983), tuturan aparat yang berbentuk *representative* dan *declarative* tidak memenuhi syarat *sincerity* dan *preparatory conditions* karena disampaikan tanpa bukti ilmiah dan prosedur transparan yang ditunjukkan kepada publik. Akibatnya, tuturan tersebut dapat mengalami kegagalan *felicity* meskipun secara formal tampak sah.

Kegagalan *felicity conditions* dan pelanggaran maksim tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menjadi alat untuk stigmatisasi masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perbedaan antara aparat dan penjual es gabus yang tidak memiliki ruang publik yang sama untuk memperbaiki pernyataan tersebut. Sebagai akibatnya, Sudrajat mengalami kerugian reputasi, tekanan psikologis, dan penurunan penjualan es gabus. Hal ini terlihat dalam laporan media dan opini publik setelah video tersebut tersebar luas (CNN Indonesia, 2026; iNews Jabar, 2026). Oleh karena itu, tuturan aparat tidak hanya berfungsi sebagai tindakan ilokusioner tetapi juga sebagai wacana kekuasaan yang mengonstruksi realitas sosial melalui mekanisme praktis.

Secara teoretis, penelitian ini meningkatkan penelitian pragmatic sociolinguistik dan kritik wacana di Indonesia dengan memberikan contoh empiris bagaimana kegagalan *felicity* dan pelanggaran maksim Grice dalam tuturan aparat dapat menyebabkan fitnah dan stigma terhadap kelompok rentan. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman etika berbahasa harus diterapkan oleh aparat, terutama dalam hal penegakan hukum di ruang publik, agar tuturan yang digunakan menyenangkan, tidak melanggar prinsip kerja sama komunikatif, dan tidak memiliki dampak negatif pada reputasi dan ekonomi masyarakat kecil. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memperluas penyelidikan ke kasus pelanggaran otoritas di berbagai tingkatan (misalnya, penegakan hukum perdagangan kaki lima, penegakan protokol kesehatan, atau penegakan moralitas publik).

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press.
- CNN Indonesia. (2026, 27 Januari). Keluarga trauma lihat Sudrajat tukang es gabus dilecehkan aparat. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260128150533-12-1322011/keluarga-trauma-lihat-sudrajat-tukang-es-gabus-dilecehkan-aparat>
- Fatmawati. (2020). Alasan pelanggaran maksim cara/pelaksanaan dalam prinsip kerja sama Grice pada budaya masyarakat Riau. *Jurnal Universitas Islam Riau*.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and conversation*. Dalam P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics 3: Speech Acts* (pp. 41–58). New York: Academic Press.
- iNews Jabar. (2026, 29 Januari). Sudrajat naik derajat! Penjual es gabus viral dapat umrah, omzet terus melejit. <https://jabar.inews.id/berita/sudrajat-naik-derajat-penjual-es-gabus-viral-dapat-umrah-omzet-terus-melejit>
- Kompas TV. (2026, 28 Januari). *Kronologi penjual es gabus difitnah aparat, mengaku dianiaya hingga berakhir damai* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=92rDEhgNkjM>.

- Kompas.com. (2026, 28 Januari). *Saat pedagang es gabus difitnah dan dianiaya polisi-tentara di Kemayoran*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/28/08451561/saat-pedagang-es-gabus-difitnah-dan-dianiaya-polisi-tentara-di-kemayoran>
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutar dalam Studi Linguistik Pragmatik. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 1–16.
<https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/view/2382>.
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yule, G. (2010). *Pragmatics* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.